

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi dan usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Koperasi sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Ditengah kondisi bangsa yang dilanda krisis ekonomi, koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kegiatan ekonomi yang lain yang telah ada, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Keberadaan koperasi mampu bertahan terbukti pada waktu krisis tahun 1998, beberapa UKM yang berbentuk koperasi hanya sedikit yang tutup karena tidak sanggup menghadapi krisis saat itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat peringatan Hari Koperasi ke 63 mengatakan:

Saat krisis tahun 1998, Indonesia ternyata bisa bangkit dan pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh positif karena ada sabuk pengamannya, yaitu koperasi dan UKM, oleh karena itu koperasi harus tumbuh dengan baik.¹

¹ Irwan Taunuzi, *Koperasi dan UKM Sabuk Pengaman Indonesia Hadapi Krisis. 2010.* (<http://www.tribunnews.com>) . diakses tanggal 15 September 2014)

Keberadaan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) dinilai sangat penting dan masih relevan di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah sepantasnya koperasi dan usaha kecil menengah mempunyai ruang gerak dan kesempatan yang luas dalam perekonomian Indonesia.

Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah perekonomian rakyat. Kebijakan Pemerintah ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”². Perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, yang dipentingkan adalah kemakmuran semua orang, bukan kemakmuran orang seorang.³ Sehubungan dengan susunan perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, maka koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian tersebut. Perekonomian Indonesia harus disusun berdasarkan azas kekeluargaan, dan badan yang sesuai dengan kekeluargaan adalah koperasi.

Organisasi memiliki peranan dan kedudukan yang penting dalam rangka mencapai tujuan sama halnya dengan koperasi sebagai kekuatan ketiga pilar ekonomi turut memiliki posisi yang strategis dimana koperasi merupakan wadah ekonomi kerakyatan dan merupakan alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung dari

² Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 128

³ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997) hal.73

kemampuan para pengawas koperasi dalam bertindak dan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan, banyak dari pengawas koperasi seharusnya mampu melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik akan tetapi karena perubahan-perubahan struktur, maka hasil kerja pengawas menjadi kurang memuaskan dan kurang efektif. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan juga merupakan penyebab dari kurangnya pengalaman pengawas koperasi dalam organisasi tersebut, sehingga perlu diberi kesempatan untuk proses pengembangan diri pengawas koperasi untuk meningkatkan kemampuan professional.

Kemampuan professional merupakan faktor penting dalam mencapai efektivitas pengendalian intern di dalam suatu organisasi. Menurut pihak Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Timur, "Sekitar 20% dari 1.751 jumlah koperasi di wilayah Jakarta Timur berada dalam kondisi tidak sehat".⁴ Pemerintah mulai menggalakan program untuk meningkatkan kemampuan professional guna mengoptimalkan efektivitas pengendalian intern koperasi. Menteri koperasi dan UKM Sjarifudin Hasan mengatakan peranan sektor UKM akan ditingkatkan lewat pemberdayaan dan penguatan koperasi serta pelaku UKM.⁵

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada

⁴ Pelita, *Peningkatan Pengetahuan Koperasi* (<http://www.pelita.or.id>). Diakses tanggal 20 Agustus 2014

⁵ Budi Prasetyo, *Pelatihan Koperasi Tingkat Nasional* (<http://www.koperasiku.com>). Diakses tanggal 9 September 2014

akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Adanya kesamaan kebutuhan untuk mencapai dan memperoleh suatu tujuan, sehingga kerjasama disini sebagai dasar untuk mencapai tujuan berorganisasi. Hidup matinya organisasi tergantung pola kerja manusianya. Oleh karena itu sudah selayaknya jika manusia mendapat perhatian yang lebih dibandingkan faktor produksi lain.

Fungsi manajemen yang dapat menentukan tercapainya tujuan koperasi adalah fungsi pengawasan dari badan pengawas.⁶ Dengan adanya tindakan pengawasan bukan berarti ingin mencari-cari kesalahan dari pengurus koperasi, tetapi berusaha untuk mencegah munculnya penyimpangan dan bertujuan agar apa yang direncanakan dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan. Melalui pengawasan yang dilakukan badan pengawas koperasi, membuat pengurus koperasi berusaha menyelesaikan beban pekerjaan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam rapat anggota, sehingga kualitas kerja membaik dan akhirnya berakibat pada efektivitas pengendalian intern yang meningkat. Melalui pengawasan bila terjadi ketidaksesuaian dengan rencana yang telah ditentukan maka dapat diambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi agar pelaksanaan kerja tidak mengalami hambatan dan pemborosan dalam segi waktu dan biaya.⁷

⁶ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta 2002), h. 186

⁷ Hani Handoko, *Dasar-dasar Manajemen dan Operasional* (Yogyakarta: BPFE, 1999), h.434

Pengawas koperasi diharapkan mempunyai kemampuan manjerial, teknis, dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu cirri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi. Penempatan tugas, wewenang, dan tanggung jawab harus disesuaikan dengan pengetahuan, latar belakang pendidikan dan keterampilan yang dimiliki agar tugas dapat dilakukan secara optimal dan tidak membebani pekerjaan pengawas koperasi yang lain. Sebaiknya juga tidak membebani pekerjaan yang membutuhkan ketelitian kerja yang tinggi kepada pengawas yang ceroboh dalam bekerja agar tidak menghambat efektivitas pengendalian intern. Hal-hal yang disebutkan secara langsung dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern pengawas koperasi. Oleh sebab itu keberadaannya perlu mendapat perhatian. Menyadari bahwa masalah koperasi tidak lepas dari unsure manusia yaitu pengawas yang bekerja di dalamnya maka diperlukan pengkajian mengenai kemampuan professional dengan efektivitas pengendalian intern pengawas koperasi.

Aspek sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dan paling dominan dalam sebuah koperasi. Salah satu faktor kegagalan sebuah koperasi adalah belum berdayanya pengendalian intern dan sering terjadi tidak adanya pengendalian intern yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan memburuknya citra koperasi secara keseluruhan.⁸

Profesional merupakan tuntutan terhadap suatu profesi yang akan sangat menentukan keberhasilan suatu pekerjaan. Profesionalisme harus menjadi acuan

⁸ Agus Setyo, *Konsep Pengendalian Internal Koperasi*.
<http://majidnanlohy.blogspot.com/2009/06/konsep-pengendalian-intern-koperasi.html>. (Diakses tanggal 30 Agustus 2014)

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Kemampuan profesional berarti menyangkut pada penggunaan teknik-teknik tertentu yang digunakan oleh individu, proses belajar dan mempraktekkan selama bertahun-tahun guna mengembangkan teknik tersebut, loyalitas individu guna mencapai kesempurnaan, dan berdiri sebagai suatu individu diantara sesamanya. Lemahnya pengawasan merupakan salah satu penyebab terjadinya penyelewengan dalam suatu organisasi koperasi. Sebagai organisasi dibidang ekonomi dan sosial koperasi sangat rawan terhadap resiko kerugian. Kerawanan tersebut dapat bersumber dari unsur internal maupun eksternal⁹. Kemampuan profesional menjadi salah satu faktor pendukung dalam penyusunan laporan yang berkualitas.

Keterbatasan pengendalian intern merupakan faktor-faktor tertentu yang menyebabkan tidak berfungsinya pengendalian intern sebagaimana mestinya. Penerapan suatu sistem pengendalian intern yang baik masih terdapat kendala-kendala yang akan menyebabkan tujuan dari pengendalian intern tersebut tidak tercapai secara memuaskan. Hal ini disebabkan adanya hal-hal yang membatasi pengendalian intern itu sendiri. Namun demikian dengan keberadaan dan penerapan pengendalian intern yang memadai diharapkan dapat menekan sekuat mungkin terjadinya kerugian yang diderita koperasi.

Pengetahuan pengawas semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman bekerja. Pengalaman kerja akan meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas kerja. Jika seorang pengawas yang berpengalaman,

⁹ Tulus Tambunan, *Penggerakan Kegiatan dan Pengawasan dalam Koperasi* (Jakarta: Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti,2000) h.3

maka pengawas menjadi sadar terhadap lebih banyak kekeliruan, pengawas memiliki salah pengertian yang lebih sedikit tentang kekeliruan, pengawas menjadi sadar mengenai kekeliruan yang tidak lazim, dan hal-hal yang terkait dengan penyebab kekeliruan di tempat terjadinya kekeliruan dan pelanggaran serta tujuan pengendalian intern menjadi relatif lebih menonjol.¹⁰

Koperasi yang menjadi objek penelitian ini yaitu Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Timur. Koperasi Pegawai Negeri merupakan suatu badan koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Dengan dibentuknya koperasi ini diharapkan pegawai mampu berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya. Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Timur merupakan badan usaha yang harus dikelola dengan baik sebagai layaknya badan usaha lain. Dalam menjalankan kegiatan usahanya dikelola secara lebih profesional. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan. Laporan pertanggungjawaban harus dapat mencerminkan bagaimana pengawas koperasi mendesain pengelolaan usaha agar semua kekayaan koperasi aman dari semua tindakan yang dapat merugikan dan penggunaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga kepercayaan para pihak terhadap koperasi dapat ditumbuhkembangkan. Kepercayaan pihak luar, dapat menjadikan koperasi

¹⁰ Ni Putu Eka Desyanti, Jurnal Akutansi dan Bisnis, Januari.2008: *Pengaruh Independensi, Keahlian Profesional dan Pengalaman Kerja Pengawas Intern terhadap Efektivitas Struktur Pengendalian Intern pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bandung*. (Bandung: Universitas Udayana Bandung), h. 35

memperoleh berbagai dukungan dari anggota yang meliputi dukungan modal, dukungan usaha sehingga usaha-usaha koperasi menjadi lebih berkembang.

Tujuan utama Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Timur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Oleh karena itu Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Timur menjalankan berbagai usaha, diantaranya adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota atau masyarakat. Bidang usaha yang dikelola Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Timur diantaranya meliputi usaha perkreditan atau simpan pinjam, usaha pertokoan atau konsumsi dan usaha jasa. Koperasi Pegawai di Jakarta Timur berjumlah 56 Koperasi yang berbadan hukum dan terdaftar di Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan. Dari 56 Koperasi Pegawai yang berada di dinas pemerintahan Jakarta Timur hanya 13 Koperasi Pegawai yang aktif sedangkan 43 Koperasi Pegawai lainnya tidak aktif. Koperasi Pegawai di Jakarta Timur ini masih banyak pengawas koperasi yang belum mengoptimalkan kemampuan profesional dalam pengendalian intern koperasi sehingga penerapan pengendalian intern belum berjalan efektif. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kemampuan profesional pengawas dengan efektivitas pengendalian intern di Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Timur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam hasil belajar sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara keterbatasan pengendalian dengan efektivitas pengendalian intern pada Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Timur?
2. Apakah terdapat hubungan antara kecurangan laporan keuangan dengan efektivitas pengendalian intern pada Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Timur?
3. Apakah terdapat hubungan antara pengalaman kerja dengan pengendalian intern pada Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Timur?
4. Apakah terdapat hubungan antara kemampuan professional dengan efektivitas pengendalian intern pada Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Timur?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah terlihat bahwa masalah efektivitas pengendalian intern pengawas pada koperasi menyangkut permasalahan yang sangat kompleks sifatnya. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah-masalah yang diteliti hanya pada masalah “Hubungan Antara Kemampuan Professional Pengawas Dengan Efektivitas Pengendalian Intern Di Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Timur”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah Terdapat Hubungan Antara Kemampuan Professional Pengawas dengan Efektivitas Pengendalian Intern di Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Timur?”

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat penelitian sebelumnya, menambah ilmu dan sumbangan pemilihan serta bahan kajian bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai hubungan kemampuan professional pengawas dengan efektivitas pengendalian intern koperasi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan acuan, masukan serta referensi bagi penelitian selanjutnya dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai instrument evaluasi terhadap hubungan kemampuan professional pengawas dengan efektivitas pengendalian intern koperasi.